

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 merupakan permasalahan serius yang berdampak pada segala aspek kehidupan khususnya pada jalannya pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena adanya pembatasan mobilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, Fungsi Legislasi sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) yang bertujuan dalam pembentukan produk hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk tetap mempertahankan kinerjanya dengan efektif. Melihat pada fenomena wabah virus Pandemi Covid-19 tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta membandingkan bagaimana pelaksanaan tata cara pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah pada masa Pandemi Covid-19 dan masa normal dengan rumusan masalah bagaimana proses pembentukan peraturan daerah pada masa Pandemi Covid-19 dan hambatan yang dihadapi beserta solusinya.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan yakni data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara terhadap anggota biro hukum serta Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Tengah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah pada masa pandemi tetap dilaksanakan sesuai dengan alur prosedur pembentukan produk hukum daerah yang secara khusus dijelaskan pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun terdapat perbedaan pada tahap pelaksanaan rapat pembahasan Raperda yang dilaksanakan dalam dua bentuk yakni fisik dan virtual dengan hasil pembahasan rapat yang berbeda secara signifikan apabila dibandingkan pada masa normal. Hambatan yang dihadapi dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain peraturan internal DPRD, sarana, dan kualitas anggota dewan dalam menyelesaikan Raperda. Selain itu terdapat faktor eksternal antara lain adanya regulasi – regulasi baru yang dikeluarkan pada masa pandemi yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pembentukan Perda. Solusi yang dijalankan antara lain mengalihkan kegiatan kumpul dalam satu ruangan untuk sementara dilakukan kunjungan kedaerah pemilihan masing – masing, Bapemperda melakukan pengkajian ulang guna percepatan dalam pembahasan rapat.

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia from 2020 to 2022 is a serious problem that has an impact on all aspects of life, especially on the implementation of government activities due to restrictions on mobility. In this regard, the Legislative Function as one of the functions of the Regional People's Representative Council (DRPD) which aims at forming legal products, namely Regional Regulations (Perda) as regulated in Article 70 paragraph 1 of Law Number 17 of 2014, is certainly a challenge. specifically for the DPRD of Central Java Province to maintain its effective performance. Looking at the phenomenon of the Covid-19 pandemic virus outbreak, This research aims to find out and compare how the procedures for forming Regional Regulations for the DPRD of Central Java Province were implemented during the Covid-19 Pandemic and normal times with a problem formulation of the process of forming regional regulations during the Covid-19 Pandemic and the obstacles faced and their solutions.

This thesis research method uses normative juridical methods. The data used is secondary data with data collection through literature study, interviews with members of law firms and the Secretary of the Central Java Provincial Council, and other materials related to the problems in this research. The data analysis method used in this research is qualitative analysis.

Based on the research results, it was found that the process of forming regional regulations during the pandemic was still carried out in accordance with the flow of procedures for forming regional legal products which were specifically explained in Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015. However, there were differences in the implementation stages of the Raperda discussion meetings which were carried out in two forms, namely physical and viral with the results of meeting discussions being significantly different when compared to normal times. The obstacles faced are influenced by two factors, namely internal and external factors. These internal factors include DPRD internal regulations, facilities and the quality of council members in completing the Draft Regional Regulation. Apart from that, there are external factors, including new regulations issued during the pandemic which caused delays in the process of forming regional regulations. The solutions implemented include shifting gathering activities to one room temporarily, carrying out visits to each electoral district, Bapemperda conducting a review to speed up meeting discussions.

Keywords : Legislative Function, DPRD, Pandemic Covid-19